
**ANALISIS PERAN KEPALA DESA DALAM MENGELOLA DAN
MERENCANAKAN KEUANGAN DESA SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN STUNTING UNTUK MENCEGAH KERUGIAN
EKONOMI BERKELANJUTAN (STUDI KASUS KECAMATAN
ASTAMBUL)**

Nurul Wasilah¹, Sofia Purnamasari², Rahmatul Huda³
silahh08@gmail.com

^{1,2,3}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Indonesia

ABSTRACT

Stunting is a problem of child growth and development caused by chronic malnutrition. Indonesia is the 5th country with the highest prevalence of stunting in the world with a figure reaching 37%. Stunting is a very big homework that must be completed by the state by transferring funds to villages to support the implementation of stunting prevention activities, which is why stunting is said to cause economic losses. In this study, the author formulates 2 problems, namely what is the impact of stunting and why stunting is said to cause economic losses and how village heads manage and plan village finances to overcome stunting in order to reduce economic losses from an Islamic economic perspective. The purpose of this study was to determine how village heads manage and plan village finances to overcome stunting in order to reduce economic losses from an Islamic economic perspective. This study used a qualitative method with an interview technique, the sampling used in this study was purposive sampling, the sample used in this study consisted of 10 respondents, namely 5 village heads and 5 parents of children who experienced stunting. The results of the study indicate that the management of village funds carried out by the village head has shown good results, the facilities and support that have been provided by the village through village funds have been sufficient to provide good services to the community. So that with the village fund transfer program, it is hoped that it can reduce stunting rates in order to reduce economic losses.

Keywords: Village Fund Management, Stunting, Economic Losses.

ABSTRAK

Stunting adalah masalah pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Indonesia merupakan negara ke 5 dengan prevalensi stunting tertinggi di dunia dengan angka mencapai 37%.

Stunting merupakan pekerjaan rumah yang sangat besar yang harus diselesaikan oleh negara dengan cara transfer dana ke desa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting, itulah mengapa stunting dikatakan dapat membuat kerugian ekonomi. Pada penelitian ini penulis merumuskan 2 masalah yaitu apa dampak dari stunting dan mengapa stunting disebut dapat menyebabkan kerugian ekonomi dan bagaimana cara kepala desa dalam mengelola dan merencanakan keuangan desa untuk menanggulangi stunting agar mengurangi kerugian ekonomi dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepala desa dalam mengelola dan merencanakan keuangan desa untuk menanggulangi stunting agar mengurangi kerugian ekonomi dalam perspektif ekonomi islam. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 10 responden yaitu 5 kepala desa dan 5 orang tua dari anak yang mengalami stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa sudah menunjukkan hasil yang baik, fasilitas dan dukungan yang sudah diberikan desa melalui dana desa sudah cukup memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya program transfer dana desa diharapkan dapat mengurangi angka stunting agar mengurangi kerugian ekonomi.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Stunting, Kerugian Ekonomi.

PENDAHULUAN

Menurut World Health Organization, stunting adalah masalah pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh infeksi berulang dan kekurangan gizi kronis. Anak stunting memiliki tinggi badan yang lebih pendek atau pendek dari biasanya. Selain itu, stunting dapat menyebabkan perkembangan kognitif, motorik, dan verbal yang tidak optimal, yang meningkatkan

kemungkinan obesitas dan penyakit degeneratif lainnya, meningkatkan biaya perawatan kesehatan, dan meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas. Pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan suatu negara dapat dirugikan dengan memiliki anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata akibat stunting. Menurut Bloom, stunting merupakan salah satu bentuk kegagalan pertumbuhan (growth faltering) yang

disebabkan oleh penumpukan nutrisi yang tidak adekuat yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama sejak seorang wanita hamil hingga anak berusia 24 bulan atau sekitar dua tahun. Dalam keadaan seperti ini, catch-up growth akan tercapai, yang akan mengakibatkan ketidakseimbangan yang tidak mencukupi.

Gizi mempunyai peran yang sangat besar Dalam hal membangun dan menjaga kesehatan seseorang. Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap orang untuk memelihara kesehatannya dan anak-anaknya, Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Setiap orang wajib menjaga kesehatan dirinya dan anak- anaknya." Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi seseorang untuk memelihara jasmaninya, keluarganya, sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Indonesia merupakan negara ke 5 dengan prevalensi stunting tertinggi di dunia dengan angka mencapai 37%. Sedangkan di wilayah Asia Tenggara Indonesia menduduki peringkat kedua dengan prevalensi stunting tertinggi dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh WHO pada tahun 2015-2017 rerata kejadian stunting di Indonesia sebanyak 36,4% dalam kawasan Asia Tenggara. Terdapat penurunan angka kejadian

stunting di Indonesia yang awalnya mencapai 37,2% pada tahun 2013 dan mengalami penurunan sebanyak 6,4% sehingga pada tahun 2018 persentasi kejadian stunting mencapai 30,8% berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat memberikan sambutan di pembukaan rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, dan Penurunan Stunting di Auditorium BKKBN Halim Perdanakusuma Jakarta, mengatakan stunting di negara kita menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar yang harus segera diselesaikan.

"Saya masuk di 2014, itu angkanya di angka 37 persen. Sebagaimana disampaikan oleh Menkes, di 2022 angkanya sudah turun menjadi 21,6 persen", jelas Presiden.

Menurut Presiden ini kerja keras kita semuanya. Dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar, dan munculnya penyakit-

penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak. Oleh sebab itu, target 14 persen di tahun 2024 ini harus kita bisa capai. "Saya yakin dengan kekuatan kita bersama, semuanya bergerak, angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama," ungkap Presiden.

Di Kalimantan Selatan pula Pemerintah Provinsi Kalsel mengapresiasi angka stunting di Kalsel mengalami penurunan sepuluh persen. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalsel sekaligus Ketua TPPS Kalsel, Muhidin pada saat Pertemuan koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi, Kabupaten dan Kota Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2022 di Banjarmasin.

Muhidin mengatakan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, prevalensi stunting di Kalsel yaitu 30%, meskipun mengalami penurunan 10% tetapi stunting di Kalsel masih melebihi angka nasional yakni 24,4%.

Peraturan No. 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi dari Kementerian Kesehatan RI. Bahwa upaya perbaikan gizi dilakukan berdasarkan pedoman yang selama ini tersebar dalam berbagai pedoman peraturan, Bahwa upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat perlu dilakukan untuk memperbaiki gizi individu dan gizi masyarakat

sepanjang siklus kehidupan, sejak dalam kandungan sampai lanjut usia, dengan prioritas utama kelompok rawan gizi. Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terpadu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 Hal ini dimaksudkan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah desa yang menghadapi masalah stunting dapat mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mendanai koordinasi kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terpadu lintas sektor. Alhasil, pemerintah dapat mengintegrasikan upaya pencegahan stunting hingga ke tingkat pemerintahan desa. Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terpadu menunjukkan bahwa kasus. Sarana dan prasarana non fisik serta kesehatan masyarakat mutlak mendapat prioritas dalam penggunaan dana desa yang digunakan untuk keduanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mempunyai sumber pendapatan

berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dalam hal pengelolaan keuangan desa, berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang ialah Kepala Desa.

Siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk (25%)
- b. Angka kemiskinan (35%)
- c. Luas wilayah (10%)
- d. Tingkat kesulitan geografis desa (30%).

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang **Analisis Peran Kepala Desa dalam Mengelola dan Merencanakan Keuangan Desa Sebagai Upaya Menanggulangi Stunting untuk Mencegah Kerugian Ekonomi Berkelanjutan. (Studi Kasus Kecamatan Astambul).**

TINJAUAN PUSTAKA

1. Stunting

Stunting adalah ketidakmampuan anak di bawah usia lima tahun untuk berkembang akibat kekurangan gizi kronis, yang menyebabkan mereka terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi dapat terjadi saat anak masih dalam kandungan maupun sesaat setelah dilahirkan. Status gizi ibu dan anak sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangannya. Namun, tidak muncul sampai anak berusia dua tahun. pada usia ini, perlu makan yang cukup. Masalah gizi ini berdampak jangka pendek pada perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme tubuh. Penurunan kekebalan dan kemampuan kognitif adalah potensi konsekuensi jangka panjang.

2. Pengelolaan dan Perencanaan Dana Desa

Buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2017 menjelaskan dana desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN dan ditujukan khusus untuk desa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan desa yang meliputi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alhasil, kewenangan tersebut dibiayai dengan menatanya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa dengan menggunakan pendapatan dari APBN.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan pemerintah mengalokasikan dana desa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangannya. Kebijakan ini mengoptimalkan dan mengintegrasikan seluruh rencana alokasi anggaran pemerintah untuk desa yang selama ini sudah ada.

Rencana pengelolaan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh satu individu

atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan dana desa merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki oleh pemangku kepentingan desa, khususnya perangkat desa. Kualitas-kualitas ini diperlukan untuk akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Transparansi, partisipasi, akuntabilitas, menjadi pedoman pengelolaan keuangan desa.

3. Kesejahteraan dan Kerugian Ekonomi dalam Perspektif Islam

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur, selamat. Tujuan kesejahteraan adalah membebaskan seseorang dari belenggu kemiskinan, kebodohan, dan ketakutan sehingga dapat menjalani kehidupan yang aman dan damai lahir dan batin.

Kesejahteraan manusia dapat dilihat dengan berbagai

cara, antara lain sebagai berikut: Pertama, jumlah penduduk, yang meliputi kepadatan penduduk, kesuburan, dan serta laju pertumbuhannya. Kedua, kesehatan, yang meliputi faktor-faktor seperti kematian bayi, usia harapan hidup, dan kematian, serta kesehatan ibu dan anak balita, serta tingkat kesehatan masyarakat. Ketiga, pendidikan yang meliputi kemampuan literasi, jumlah siswa yang bersekolah, dan fasilitas sekolah. Keempat, ketenagakerjaan, yang meliputi kesempatan kerja, status pekerjaan, dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Kelima, pola dan tingkat konsumsi suatu rumah tangga, termasuk bagaimana distribusi pendapatan dan pengeluaran (pangan dan bukan pangan). Keenam, perumahan, yang meliputi menjaga kebersihan lingkungan dan penataan tempat tinggal. Ketujuh, kegiatan sosial budaya, yang meliputi kegiatan kebudayaan dan akses terhadap hiburan dan informasi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Berbeda dengan eksperimen, di mana peneliti merupakan instrumen utama untuk

mengumpulkan dan menginterpretasikan data, metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang didasarkan pada filosofi postpositivisme dan interpretatif dan digunakan untuk mempelajari kondisi objek yang alami. Pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi biasanya digunakan dalam alat pengukuran data. Lebih jauh lagi, makna di atas generalisasi ditekankan dalam temuan penelitian kualitatif. Untuk mengetahui mengapa dan bagaimana masalah muncul, peneliti harus menggunakan metode kualitatif ini, yang dimulai dengan wawancara dan melibatkan pengumpulan informasi dari informan.

Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan bahwa sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Data yang sudah diperoleh dikumpulkan langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dengan melakukan wawancara.

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Pengertian data primer adalah sebuah data yang berlangsung didapatkan dari sumber dan diberikan kepada pengumpul data atau peneliti. Sugiyono juga berpendapat bahwa wawancara dengan partisipan

penelitian atau observasi langsung merupakan sumber data utama. Perumusan masalah merupakan fungsi utama dari data primer. Ada fungsi tambahan, seperti bahan evaluasi untuk organisasi dan peneliti. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara terhadap kepala desa dan orang tua dari anak yang mengalami stunting baik secara observasi ataupun pengamatan turun langsung ke lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber lain. Data sekunder biasanya disajikan dalam bentuk tabel, bagan, atau grafik. Jenis data ini berisi informasi yang ditandai dengan "dikutip", yang menunjukkan bahwa peneliti tidak memperoleh data dari sumber primer. Selain itu, data yang sangat dipengaruhi oleh jenis penelitian yang dilakukan merupakan data sekunder. Maka dari itu, jenis data yang tersedia seringkali tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Mengenai beberapa contoh data sekunder, seperti jumlah penduduk, ekspor- impor, spesifik, dan gambaran kondisi fisik suatu wilayah. Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui jurnal dan data-data yang terkait terhadap kasus yang akan diteliti.

Sebagai hasil akhir penelitian, maka diperlukan adanya suatu data. Berikut adalah beberapa metode yang

digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data, sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mempelajari atau menyelidiki perilaku nonverbal. Jika dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya, observasi memiliki karakteristik tertentu. Selain manusia, objek alam lainnya juga bisa diamati. Peneliti dapat belajar tentang perilaku dan maknanya melalui kegiatan observasi. Untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya digunakan pengamatan langsung di lapangan dalam penelitian ini.

2. Wawancara

Salah satu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah dengan melakukan wawancara. Untuk mendapatkan informasi dari responden terkait, wawancara melibatkan komunikasi dua arah. Wawancara juga dapat digambarkan sebagai percakapan tatap muka antara pewawancara dengan narasumber dimana pewawancara menanyakan secara langsung objek yang hendak diteliti dan telah direncanakan sebelumnya. Peneliti memilih wawancara yang semi terstruktur. Berbeda dengan wawancara terstruktur yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah ditentukan, wawancara semi terstruktur semacam ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam.

Wawancara yang menanyakan responden, kepala desa yang dimintai pendapat, konsep, dan solusi untuk masalah yang ada, bertujuan untuk mengungkap masalah secara lebih jujur.

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik wawancara dimana sebagai sampel responden 5 kepala desa dan beberapa orang tua dari anak yang mengalami stunting . Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling sesuai dengan namanya sampel diambil dengan maksud dan tujuan tertentu. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang ingin kita teliti.

3. Dokumentasi

Proses memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, angka tertulis, dan gambar berupa laporan dan informasi yang dapat mendukung penelitian disebut dengan dokumentasi. Jika didukung dengan foto atau tulisan akademik yang ada, dokumen yang melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara akan lebih terpercaya atau memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Namun, tidak semua dokumen sangat kredibel. Karena foto dapat dibuat untuk tujuan tertentu, misalnya, banyak foto yang tidak

mencerminkan keadaan aslinya secara akurat.

Dokumentasi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara memfoto setiap kegiatan penelitian yang saya ambil dilapangan sebagai data dan bukti bahwa saya telah melakukan penelitian.

Hasil analisis data digunakan sebagai bukti yang cukup untuk mencapai kesimpulan penelitian. Dalam penelitian, analisis data digunakan untuk mencari solusi masalah, menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, dan memberikan informasi untuk menarik kesimpulan dan membuat rekomendasi untuk kebijakan penelitian selanjutnya.

Teknik analisis data kualitatif yang digunakan yaitu model Miles dan Huberman sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Analisis ini dilakukan sebelum peneliti benar-benar turun lapangan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperjelas fokus penelitian. Dengan kata lain, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara dan mengumpulkan dokumen yang dapat memberikan informasi dan data terkait fokus penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta membuang yang dianggap tidak perlu, sehingga data hasil reduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memberikan kemudahan dalam pengumpulan data.

3. Penyajian Data

Sebuah laporan yang sedang diteliti dapat dibuat lebih mudah untuk dipahami dengan menyajikan data. Data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, bagan, grafik, diagram, dan format serupa lainnya. Tujuan penyajian data adalah untuk membuat informasi yang rumit menjadi lebih mudah dipahami dengan mereduksinya menjadi data sederhana.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan, atau verifikasi adalah tahap proses analisis data yang terakhir. Pada saat pengumpulan data, peneliti membuat kesimpulan yang kuat berdasarkan data yang direduksi dan disajikan. Dalam penelitian kualitatif, diharapkan temuan pada kesimpulan akan bersifat temuan baru yang sebelumnya pernah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyebab Stunting yang Berdampak Merugikan Ekonomi

Sudah banyak teori yang telah memberikan penjelasan tentang berbagai faktor yang dapat

menyebabkan stunting, antara lain pernikahan dini, faktor ekonomi rumah tangga, pola asuh yang buruk dari orang tua, kurangnya makanan bergizi, dan sanitasi yang tidak sehat.

Yang pertama adalah pernikahan dini yang dapat menyebabkan stunting. Karena belum siap memiliki anak, semakin muda seorang wanita menikah, semakin besar kemungkinan anaknya mengalami stunting. Karena tingginya kemungkinan perdarahan saat melahirkan, pernikahan muda menimbulkan risiko medis yang signifikan. Menurut wawancara, masih banyak pernikahan dini di perdesaan yang menyebabkan stunting lebih banyak. Mungkin saja tidak banyak yang terdaftar karena secara administratif orang yang berusia di bawah 19 tahun tidak boleh menikah. Perkawinan di luar nikah atau disebut juga dengan "pernikahan di luar nikah" masih marak terjadi di setiap desa.

Desa dapat memberikan pendidikan dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin selama masa pernikahan dengan pendampingan yang diberikan oleh bidan desa dan ketua PKK desa. Jika ada yang masih kurang sehat, disarankan untuk menunda kehamilan untuk memastikan kesiapan fisik dan mental calon ibu.

Penyebab kedua adalah ekonomi rumah tangga dan kurangnya

makanan bergizi dalam rumah tangga. Pada penelitian ini banyak ibu yang dikategorikan tidak bekerja, dan mayoritas orang tua dari anak yang mengalami stunting adalah ibu rumah tangga. Meskipun pendapatan ekonomi rumah tangga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian stunting, namun hal tersebut dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan gizi anaknya yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Namun bukan berarti rumah tangga dengan pendapatan rendah dapat menyebabkan stunting. Semuanya kembali ke metode pengasuhan orang tua mereka.

Ibu Maulidah mengatakan “mungkin menurut aku kebutuhan gizi anak aku sudah terpenuhi, tapi aku kurang tau jua kayapa makanan yang bagus gizinya tapi aku pasti memberi anakku makan sayur, mun buah jarang aku nukar akan tapi mun sayur alhamdulillah tetukar aja”.

Hal ini sejalan dengan pembahasan kajian teori yang menyatakan bahwa status ekonomi keluarga dapat mempengaruhi berapa banyak makanan yang mereka beli dan makan yang dapat mempengaruhi status gizi anak-anak mereka. Meningkatnya pendapatan seseorang maka meningkat pula persentasi dari penghasilan yang digunakan untuk membeli makanan seperti buah-

buah, sayuran, dan bahan makanan lainnya. Dalam hal ini Pemerintah Desa membantu dengan memberikan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang disiapkan langsung oleh kader posyandu dengan berkonsultasi dengan bidan desa untuk memastikan bahwa makanan tersebut mengandung zat gizi yang diperlukan untuk anak.

Pola asuh orang tua yang buruk adalah faktor ketiga. Mengajarkan nilai atau norma kepada anak-anak, memperhatikannya, dan mencontohkan sikap dan perilaku positif adalah semua aspek pengasuhan. sehingga perkembangan anak juga akan mendapat manfaat dari pola asuh yang baik. Pola asuh sangat erat kaitannya dengan kejadian stunting, pola asuh ibu yang kurang pada balita yaitu pemberian makan, praktik kebersihan dan pelayanan kesehatan. Sehingga apabila pola asuh orang tua yang rendah akan menyebabkan status gizi buruk pada anak.

2. Cara Kepala Desa mengelola dan merencanakan keuangan desa untuk menanggulangi stunting agar mengurangi kerugian ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Penanggulangan stunting menjadi tanggung jawab bersama, Setiap orang dalam keluarga, bukan

hanya pemerintah, memiliki andil dalam pencegahan stunting. Karena dalam jangka panjang, stunting berdampak negatif tidak hanya pada pertumbuhan dan perkembangan anak tetapi juga pada pertumbuhan bangsa yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi.

Presiden Republik Indonesia memiliki visi meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia dengan memperkuat desa dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan membangun Indonesia dari pinggiran. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur amanat dan kewenangan desa, seperti kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan dari pemerintah pusat, kewenangan dari pemerintah provinsi. Dengan diberikannya kewenangan dari pemerintah daerah.

pemerintah kabupaten/kota, dan kewenangan dari pemerintah pusat, Desa dapat menyelenggarakan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan berskala desa dengan memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk mengelola kegiatan yang ditugaskan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan hak asal usul dan kewenangan daerah.

Perjuangan melawan stunting kini menjadi prioritas nasional, dan sangat mungkin desa-desa akan mengembangkan kegiatan untuk mengelola stunting dalam skala desa. Melalui mekanisme perencanaan dana desa, desa dapat menggunakan dana sdesa yang bersumber dari APBN untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Kelampaian Ilir, Kepala Desa Astambul Seberang, Kepala Desa Astambul Kota, Kepala Desa Pingaran Ilir, dan Kepala Desa Kaliukan semuanya memberikan tanggapan yang sama terkait fasilitas yang diberikan seperti pembangunan poskesdes sebagai lokasi posyandu rutin bulanan ibu hamil, bayi, balita, dan remaja. Poskesdes berfungsi sebagai wadah untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat pedesaan, pembuatan tandon air bersih dan sanitasi, pembuatan jambat sehat yang diberikan 50 unit pertahun yang dilakukan dari tahun 2021 dan ambulans yang digunakan untuk mempercepat layanan darurat masalah kesehatan, bencana alam, dan kesiapsiagaan untuk mengatasi masalah kesehatan yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi.

Sedangkan dukungan yang sudah diberikan kepada masyarakat melalui dana desa untuk penanggulangan stunting salah satunya yaitu Peran lintas sektoral atau memberikan dukungan pelayanan kesehatan yang sangat penting dalam mengatasi stunting meliputi penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan (PMT) untuk perbaikan gizi balita, pemeriksaan kehamilan, dan pemberian tablet darah tambahan (pil FE) untuk ibu hamil selama 90 hari, hal tersebut merupakan beberapa dukungan yang telah diberikan kepada masyarakat melalui dana desa untuk pencegahan stunting. Serta pelatihan dan pembinaan kader kesehatan masyarakat agar kader kesehatan terlatih dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan program kesehatan desa. Menurut wawancara dengan lima kepala desa, bidan desa juga mengunjungi anak-anak yang terindikasi stunting, dengan tujuannya untuk memberikan edukasi para orang tua dari anak-anak tersebut dan memberikan mereka makanan bergizi berupa susu dan biskuit untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang.

Dari wawancara yang peneliti lakukan di lima desa tersebut. Hanya desa Kelampaian Ilir, Astambul Kota, dan Kaliukan yang sudah memiliki ambulans, sehingga ada perbedaan

cara desa menyediakan layanan tersebut. Sementara itu, baru masuk dalam Alokasi Dana Desa untuk rancangan anggaran belanja pada tahun 2024 oleh desa Pingaran Ilir dan Astambul Seberang, sehingga diprioritaskan agar pada 2024 sudah tersedia bagi masyarakat setempat.

3. Pengelolaan dana desa dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam perspektif Islam.

A. Akuntabilitas

Tanggung jawab dalam Islam adalah memiliki sifat Amanah dan Siddiq yang artinya dapat diandalkan dan sah. Kepercayaan hanya dapat dibangun melalui kejujuran. Anda dapat dengan mudah membayangkan bahwa orang-orang yang dipimpin (masyarakat) tidak akan mempercayai pemimpin suatu organisasi, komunitas, atau bangsa jika dia tidak jujur.

Akuntabilitas merupakan sebuah tanggung jawab seorang pemimpin yang masyarakatnya telah memberikan amanah kepada mereka untuk menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Seorang kepala desa harus amanah, adil, dan jujur agar berhasil dalam mengemban tanggung jawab tersebut. Masyarakat desa akan merasakan manfaat dari akuntabilitas oleh seorang pemimpin yang baik. Gagasan tanggungjawab berlaku tidak

hanya untuk didunia tetapi juga tanggung jawab kepada Allah SWT.

B. Transparansi

Prinsip keterbukaan yang dikenal dengan transparansi memungkinkan masyarakat umum memiliki akses penuh terhadap informasi keuangan desa. Sementara itu, menurut Krina, keterbukaan adalah regulasi yang menjamin akses atau kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang administrasi, khususnya informasi tentang strategi, cara pembuatan dan pelaksanaan yang paling umum, dan hasil yang telah dicapai.

C. Partisipasi

Sebagai salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Oleh karena itu, Musyawarah Perencanaan Desa (Musrembangdes) digunakan untuk menyusun program perencanaan dan kegiatannya. Musrembangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa. Setiap anggota masyarakat berkontribusi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil kepentingannya, sesuai dengan prinsip partisipasi.

Pembahasan

Apabila mempertimbangkan partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari dana desa memang harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, bahan utama penyusunan APBDes adalah rencana penggunaan dana desa yang dibahas di tingkat desa dan disepakati oleh pemerintah desa dan BPD sebagai perwakilan masyarakat. Pedoman ini nantinya akan menjadi pedoman kegiatan pelayanan dan pengembangan masyarakat selama satu tahun.

Maka dari itu agar dana desa yang dikeluarkan tidak melebihi dari anggaran setiap desa selalu melakukan rapat musyawarah desa dengan mengundang unsur-unsur masyarakat untuk mendengarkan usulan-usulan masyarakat apa yang diperlukan dan apa yang harus diperbaiki sehingga tersusun lah rancangan anggaran belanja dengan mempertimbangkan survei harga terlebih dulu, mendahulukan yang termasuk prioritas (salah satunya yaitu stunting), sehingga untuk keterbatasan anggaran tidak mungkin terjadi.

Komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah desa

dapat dilihat dari hasil wawancara ini untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam meningkatkan partisipasi dengan tetap menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat. Semoga dengan adanya Dana Desa tersebut dapat memberikan fasilitas dan dukungan yang layak kepada masyarakat terutama anak yang mengalami stunting dan mendapatkan layanan prioritas untuk membantu perbaikan gizinya sehingga sembuh dari kata stunting. Sehingga apa yang sudah dilakukan Pemerintah Desa dapat Mengurangi angka stunting di desanya dan dapat mengurangi kerugian ekonomi yang disebabkan oleh stunting.

Dari hasil keseluruhan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti sudah dapat memberikan jawaban bahwa sebenarnya tujuan dari Dana Desa ialah untuk mensejahterakan seluruh masyarakat desa dengan berbagai cara agar seluruh masyarakat desa dapat merasakan bagian mereka dari Dana Desa tersebut.

Dana Desa yang disalurkan Negara kepada desa diharapkan dapat membantu permasalahan yang ada di desa salah satunya yaitu stunting. Dan tugas desa ialah memberikan fasilitas dan dukungan yang dapat mencegah bertambahnya angka stunting di desa sekaligus juga dapat mengurangi angka stunting yang sudah ada di

desa. Sehingga, apabila semakin berkurang angka stunting maka Dana Desa yang dianggarkan juga semakin dikit. Hal ini tentu dapat membantu negara mengurangi resiko kerugian ekonomi berkelanjutan yang disebabkan oleh stunting, sehingga yang menjadi prioritas negara nantinya ialah membayar hutang pinjaman yang digunakan untuk penanggulangan stunting.

Hal ini relevan dengan penelitian terdahulu pada tabel 1.1 yang dilakukan oleh Hendrawan yang berjudul "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa dengan Pendekatan Good Governance" yang menyatakan bahwa pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang mengelola dana desa menggunakan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Penelitian tersebut dikatakan relevan karena hasil penelitiannya sesuai dengan penelitian ini dan secara jelas menyatakan bahwa desa yang diteliti sudah menerapkan prinsip tersebut. Hanya saja ada sedikit yang membedakan yaitu anggaran pendapatan dan belanja yang tidak dilaporkan kepada masyarakat dalam bentuk informasi, dalam penelitian ini anggaran pendapatan dan belanja desa disetiap desa dilaporkan kepada masyarakat lewat papan informasi yang berada di halaman balai desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis pengujian pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Dampak stunting sudah sangat jelas terlihat dari tinggi badan anak kurang dari tinggi badan anak normal seusianya. Sudah banyak sekali fasilitas dan dukungan yang diberikan Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagai upaya penanggulangan stunting tetapi masih banyak masyarakat yang kurang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bahaya stunting. Dalam hal ini peran Pemerintah Desa ialah dengan mengadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan cara mendatangkan orang dari dinas kesehatan. Semoga dengan banyaknya fasilitas dan dukungan yang sudah diberikan Pemerintah Desa dapat mencegah dan mengurangi stunting yang ada di desa, sehingga sedikit demi sedikit dapat mengurangi kerugian ekonomi berkelanjutan pada Negara yang disebabkan oleh stunting.
2. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kelampaian Ilir, Desa Astambul Seberang, Desa Astambul Kota, Desa Pingaran Ilir, dan Desa

Kaliukan sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi sudah dilakukan dengan tertib sesuai dengan perspektif Islam dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan Dana Desa selalu melibatkan semua unsur masyarakat yang terlibat dalam Musyawarah Desa. Laporan pertanggungjawaban dan pencatatan laporan keuangan pun sudah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara keterbukaan dengan pemasangan baliho berisi informasi penggunaan dana APBDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Liliandriani, Yulius Urwatil. "Hubungan Pernikahan Dini terhadap Kejadian Stunting pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Tawalian Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa." *Journal Pegguruang* 2 No 1 (2020).
- Ani Margawati, Novita Milda Susanty. "Hubungan Derajat Stunting, Asupan Zat Gizi dan Sosial Ekonomi Rumah Tangga dengan Perkembangan Motorik Anak."

- Journal Of Nutrition Collage 1 No 1 (2012).
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015.
- Baihaki, Egi Sukma. "Gizi Buruk dalam Perspektif Islam." *Journal Of Islamicate Multidisciplinaty* 2 (2017): 84.
- Ezizia Selvia, Onsardi Marini. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4 N0 3 (2020).
- Fahlevi, Reza. Studi Prinsip Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Gampong Kuta Barat Kots Sabang. Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2020.
- Fani Ramadhani, Nur Azizah, Malikul Hafiz. "Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam." *Journal Of Islamic Economics and Finance Studies*. 1 No 1 (2020).
- Hendrawan, Analisis Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Good Governance (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020).
- Muh. Saleh Ridwan, Nurhayati. "Pengelolaan Dana Desa dalam Persepektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 1 No 1 (2019).
- Noviansyah. Strategi Percepatan Pencegahan Stunting dengan Pendekatan Keagamaan Guna Mewujudkan Generasi Berkualitas. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Nyoman Subanda, Dewi Prihatini. "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana desa dalam Upaya Pencegahan Stunting Terintegrasi." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4 No 2 (2020).
- Pratiwi, Rizka. "Dampak Status Gizi Pendek (Stunting Terhadap Prestasi Belajar" 12 (2021): 2.
- Purwana, Agung Eko. "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 11 No 1 (2014): 21.
- Ryan Rahmat Hidayat, Strategi BKKBN Dalam Menanggulangi Stunting di Desa Sidoharjo Kabupaten Kulon Progo DIY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).
- Rini Archida Saputri, Upaya Pemerintah Dalam

- Penanggulangan Stunting di Provinsi Bangka Belitung (Universitas Bangka Belitung, 2019).
- Rouzi Amsyal Junia Farma Cut Dian Fitri, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pemukiman Mesjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah* 4 No 1 (2020).
- Shintia Dewi, Icha. "Analisis Pengelolaan Dana Desa terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2019, 43.
- Wahyuni Bahtiar, Nurhalika. Hubungan Pola Asuh Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Balita Di Daerah Pesisir Desa Bonto Ujung Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 2019.
- Yusuf, Rikawati. Hubungan Sosial Ekonomi Dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 2-5 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Barombong. *Stikes Panakkukang Makassar*, 2018.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Direktorat Jendral Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. (2019). *Kajian Fiskal Regional*.
- Direktorat Jendral Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI. (2022). *Peraturan Presiden Indonesia Nomor 72 Tahun 2021*.
- Direktorat Jendral Perbendaharaan, Kementerian Kuangan RI. (2022). *Pemanfaatan Dana Desa Untuk Penanganan Stunting*.
- Muiz Raharjo, S.STP., M.SI., Muhammad. (2021). *Pengelolaan Dana Desa*. PT Bumi Aksara.
- Kesehatan RI, Peraturan Menteri. (2014). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi*.
- Kuangan Republik Indonesia, Peraturan Menteri. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113

- Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, t.t.
- Rahayu S.KM, Atikah. (2018). "Study Guide- Stunting dan Upaya Pencegahannya." CV Mine, 11.
- Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan. (2018). Hasil Utama Riskesdas 2018. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Republik Indonesia, Kementerian Keuangan. (2019) Buku Pintar Dana Desa. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2017) Buku Saku Dana Desa
- Lexi J, Moleong. (2000) Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
- Sakirah. (2022). Perkembangan Pemikiran dan Peradaban Ekonomi Islam. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sugiyono. (2018) Metode Penelitian Manajemen. Alfabeta,cv.
- Sunarti, SKM., M.Kes., Paskalia Tri Kurniati, SST., M. Kes. (2020) Stunting dan Pencegahannya. Lakeisha.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang APBD, Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah, 2014.
- Zenal Mutaqin, Zeni. (2022). stunting pada anak. Indonesia: Media Sains Indonesia.
kemenkeu.go.id. "Dana Desa: Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya," 2021.
- RH, Arief. "Angka Stunting di Kalsel Turun 10 Persen," t.t.
<https://diskominfo.mc.kalselprov.go.id/2022/09/05/angka-stunting-di-kalsel-turun-10-persen/>.
- Yolanda Madea. "Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Dana Desa." media.neliti.com, 2016.
- Humas BKPK, "Angka Stunting Tahun 2022 Turun Menjadi 21,6 Persen". Dikutip dari <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/angka-stunting-tahun-2022-turun-menjadi-216-persen/#:~:text=Dalam%20kesempatan%20yang%20sama%20saat,%2C6%25%20di%20tahun%202022.> Pada tanggal 18 Februari 2023.
- Diskes baliprov.go.id "cegah stunting untuk masa depan anak yang lebih baik" Dikutip dari <https://diskes.baliprov.go.id/cegah-stunting-untuk-masa-depan-anak-yang-lebih-baik>. Pada tanggal 19 Februari 2023.
- Detikfinance, "Kurangi Stunting, RI Dapat Utang Rp 5,8 T dari Bank Dunia". Dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4219278/kurangi-stunting-ri-dapat-utang-rp-58-t-dari-bank->

- dunia . Pada Tanggal 22 Februari 2023
- Bahtsul Masail (2017), "Status Utang Negara dalam Hukum Islam". Dikutip dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/status-utang-negara-dalam-hukum-islam-zEOCJ>. Pada Tanggal 22 Februari 2023.
- Wikipedia "Kerugian Ekonomi Murni", Dikutip dari https://en-m-wikipedia-org.translate.google/wiki/Pure_economic_loss?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. Pada tanggal 15 Februari 2023.
- Mahmuda Attar Hussein, "Tafsir An Nisa Ayat 9, Jangan Tinggalkan Generasi yang Lemah", Dikutip dari <https://tafsirweb.com/1541-surat-an-nisa-ayat-9.html>. Pada tanggal 12 Juli 2023.